

Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Rahmat Putra ^{1,*}, Sigit Purnomo ², Suparman ³^{1, 2, 3} Program Studi Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia^{*} Corresponding author email: rahmatputra@gmail.com

ABSTRACT

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi pendekatan utama dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional di Indonesia. Tahun 2025 menjadi momen penting dalam pelaksanaan strategi yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025. Metode penelitian dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menelaah peran kebijakan pemerintah, investasi hijau, pembangunan inklusif, dan inovasi teknologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antar sektor dan konsistensi kebijakan menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar transformasi menuju ekonomi berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang.

Article History

Received 2025-10-27

Revised 2025-11-05

Accepted 2025-12-16

Keywords

Strategi,
Ekonomi
Berkelanjutan,
Pertumbuhan
Ekonomi,
Ekonomi Inklusif

Copyright © 2025, The Author(s)
This is an open-access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali tidak dibarengi dengan keberlanjutan lingkungan dan pemerataan sosial. Model pembangunan konvensional yang terlalu menekankan pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sering mengabaikan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dari laju deforestasi yang tinggi, pencemaran lingkungan, serta ketimpangan pendapatan yang masih cukup lebar antar wilayah dan kelompok masyarakat (BPS, 2023).

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional, namun eksplorasi yang tidak terkendali berisiko menggerus daya dukung lingkungan. Hal ini menuntut adanya pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial, selain aspek ekonomi (Barbier, 2010). Menyongsong tahun 2025, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya kuat secara kuantitatif tetapi juga berkelanjutan secara kualitas. Pertumbuhan tersebut diharapkan tidak menciptakan tekanan lingkungan dan sosial yang membahayakan masa depan pembangunan. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi semakin relevan dan mendesak untuk diimplementasikan (Bappenas, 2022).

Strategi ekonomi berkelanjutan menjadi prioritas dalam mendukung agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), terutama dalam konteks pemulihan pasca pandemi dan pergeseran menuju ekonomi hijau. Pandemi COVID-19 telah memperlihatkan pentingnya sistem ekonomi yang tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan. Pemulihan ekonomi yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan akan menciptakan kerentanan baru di masa mendatang (UNDP, 2022).

Pemerintah Indonesia telah menyusun sejumlah kerangka kebijakan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Peta Jalan Ekonomi Hijau 2022-2045. Dalam dokumen tersebut, terdapat arah kebijakan yang menekankan efisiensi energi, transisi menuju energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,

serta penguatan ekonomi sirkular (Bappenas, 2022). Visi pembangunan berkelanjutan di tahun 2025 diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Namun demikian, implementasi strategi pembangunan berkelanjutan masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran hijau, rendahnya literasi pembangunan berkelanjutan, serta resistensi dari pelaku usaha konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya transformasi struktural dan pendekatan holistik untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh aspek pembangunan nasional (Sachs, 2015). Di sisi lain, peluang pengembangan ekonomi berkelanjutan sangat terbuka lebar, terutama dengan adanya kemajuan teknologi dan digitalisasi, peningkatan kesadaran masyarakat akan isu lingkungan, serta dorongan global untuk dekarbonisasi. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan industri hijau yang dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi ke depan (IEA, 2023).

Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, penting bagi Indonesia untuk merumuskan strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang terukur, inklusif, dan berbasis data. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan strategis yang dapat ditempuh oleh Indonesia dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan di tahun 2025. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi kontribusi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berorientasi jangka panjang dan berdampak luas.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan ekonomi berkelanjutan merupakan konsep yang berakar pada laporan World Commission on Environment and Development (WCED) tahun 1987 yang dikenal dengan Brundtland Report. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan ini menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (WCED, 1987).

Menurut Sachs (2015), pembangunan berkelanjutan terdiri atas tiga pilar utama, yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi menekankan pada pertumbuhan yang stabil dan inklusif; pilar sosial pada keadilan, kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan; sedangkan pilar lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Ketiga pilar tersebut harus dijalankan secara sinergis agar pembangunan tidak menciptakan ketimpangan atau kerusakan ekosistem. Barbier (2010) menambahkan bahwa ekonomi hijau (green economy) merupakan langkah strategis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau didefinisikan sebagai model ekonomi yang rendah emisi karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Dalam konteks Indonesia, transisi menuju ekonomi hijau menjadi bagian dari reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang tangguh terhadap risiko lingkungan dan sosial.

Di tingkat nasional, Bappenas (2022) telah menyusun Peta Jalan Ekonomi Hijau Indonesia 2022–2045 yang menjadi landasan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini mencakup strategi transisi energi bersih, efisiensi energi, pengelolaan sampah, pembangunan pertanian berkelanjutan, serta penguatan industri ramah lingkungan. Peta jalan ini menunjukkan pentingnya komitmen jangka panjang dan konsistensi dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Studi oleh Kementerian Keuangan (2023) juga menunjukkan bahwa dukungan fiskal sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah green budgeting dan penerbitan sukuk hijau (green sukuk) yang dialokasikan untuk proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi hijau, dan konservasi lahan. Hal ini memperlihatkan pentingnya kebijakan fiskal dalam mendorong investasi berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ekonomi sirkular juga menjadi bagian dari teori yang relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada penggunaan ulang, daur ulang, dan pengurangan limbah dalam proses produksi dan konsumsi. Menurut Ellen MacArthur Foundation (2019), ekonomi sirkular

mampu meningkatkan produktivitas sumber daya dan mengurangi tekanan terhadap lingkungan, yang sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi tantangan pengelolaan limbah.

Dari perspektif sosial, pendekatan pembangunan inklusif menjadi krusial dalam kerangka teori pembangunan berkelanjutan. Sen (1999) menekankan bahwa pembangunan harus memberi ruang bagi kebebasan individu dan kelompok masyarakat untuk berkembang. Di Indonesia, hal ini tercermin dari program pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan inklusi keuangan, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di wilayah tertinggal yang secara langsung memperkuat daya dukung sosial pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, teori dan studi terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan sangat ditentukan oleh integrasi lintas sektor, partisipasi multipihak, serta adanya insentif dan regulasi yang tepat. Dalam konteks Indonesia tahun 2025, teori-teori ini menjadi dasar penting dalam merancang strategi pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari publikasi pemerintah (Bappenas, Kemenkeu, KLHK), jurnal ilmiah, laporan Bank Dunia dan UNDP, serta hasil kajian akademik terkait strategi ekonomi berkelanjutan. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi strategi utama yang diterapkan di Indonesia dan potensi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dalam dokumen tersebut, transisi energi, pengembangan ekonomi hijau, dan penguatan kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas pembangunan. Strategi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak lagi hanya mengandalkan model pertumbuhan berbasis eksploitasi sumber daya alam, melainkan mengarah pada transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Bappenas, 2022). Menuju tahun 2025, arah kebijakan pembangunan diproyeksikan akan semakin menekankan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas birokrasi, dan penyediaan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Pemerintah juga mulai menerapkan mekanisme green budgeting guna mengarahkan belanja negara ke sektor-sektor yang memiliki kontribusi langsung terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong terciptanya sinergi antara perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran negara (Kementerian Keuangan, 2023).

Komitmen Indonesia dalam Paris Agreement turut memperkuat arah kebijakan nasional. Melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mewujudkan target ini, pemerintah mengembangkan berbagai instrumen kebijakan seperti perdagangan karbon (carbon trading), pungutan karbon (carbon tax), dan skema subsidi untuk energi baru terbarukan (KLHK, 2022).

Di sektor energi, reformasi besar sedang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat adopsi energi bersih. Pemerintah melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menargetkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 23% pada tahun 2025. Hal ini didukung dengan penghapusan bertahap subsidi energi fosil dan peningkatan investasi di bidang tenaga surya, angin, panas bumi, dan bioenergi (ESDM, 2023).

Selain kebijakan energi, pemerintah juga mengembangkan kebijakan sektor lainnya yang mendukung prinsip keberlanjutan, seperti pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan kebijakan pangan berkelanjutan. Program seperti Food Estate dikaji ulang untuk memperhatikan aspek keberlanjutan ekologis dan sosial.

Kementerian/Lembaga juga didorong untuk menyelaraskan kebijakan sektoral dengan peta jalan pembangunan hijau (Bappenas, 2022). Pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan berkelanjutan. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal dan perencanaan pembangunan daerah berbasis data lingkungan, daerah diberikan wewenang lebih besar dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Insentif seperti Dana Insentif Daerah (DID) berbasis kinerja lingkungan mulai diperkenalkan sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola pembangunan yang berwawasan lingkungan di tingkat lokal (UNDP, 2022).

Meski kebijakan formal telah disusun, tantangan tetap ada pada aspek implementasi. Masalah koordinasi lintas sektor, tumpang tindih regulasi, dan kapasitas lembaga pelaksana menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi sistem perencanaan dan pengawasan, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil menjadi faktor penentu keberhasilan strategi penguatan kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan menuju 2025.

Peningkatan Investasi Hijau

Investasi hijau merupakan salah satu pilar penting dalam strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Investasi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mencakup pertimbangan lingkungan dan sosial dalam setiap keputusan pembiayaan. Di Indonesia, peningkatan investasi hijau menjadi strategi utama dalam mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan efisien sumber daya, sesuai dengan komitmen terhadap Paris Agreement dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) (UNEP, 2021). Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2024, terdapat peningkatan signifikan dalam realisasi investasi di sektor-sektor hijau seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, konservasi air, serta transportasi berkelanjutan. Investasi pada pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin, misalnya, meningkat seiring dengan regulasi dan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Sektor pengelolaan limbah, khususnya teknologi waste-to-energy dan daur ulang, juga menunjukkan potensi besar dalam menarik minat investor domestik maupun asing (BKPM, 2024).

Pemerintah menyadari pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor merasa aman dan tertarik menanamkan modal pada sektor-sektor berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kepastian hukum, penyederhanaan perizinan, serta insentif fiskal bagi proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan positif. Upaya seperti harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, serta penguatan sistem penilaian lingkungan strategis, menjadi langkah penting dalam mempercepat arus investasi hijau (OECD, 2023).

Salah satu instrumen pembiayaan yang semakin berkembang di Indonesia adalah penerbitan green sukuk dan obligasi hijau. Instrumen ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengelolaan hutan, konservasi sumber daya air, serta pengembangan transportasi beremisi rendah. Hingga 2023, Indonesia telah menerbitkan green sukuk senilai lebih dari USD 3 miliar, menjadikannya salah satu pelopor pembiayaan hijau di kawasan Asia Tenggara (Kementerian Keuangan, 2023). Selain pembiayaan pemerintah, sektor swasta juga mulai aktif terlibat dalam pendanaan hijau. Perusahaan besar mulai mengadopsi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam kebijakan investasinya, termasuk dalam hal pengelolaan risiko iklim dan emisi karbon. Beberapa bank dan lembaga keuangan telah mengembangkan produk-produk keuangan hijau seperti green lending dan sustainable bonds, yang mendukung pelaku usaha ramah lingkungan skala kecil maupun besar (IFC, 2022).

Namun, tantangan masih cukup besar dalam meningkatkan kualitas dan volume investasi hijau di Indonesia. Masalah keterbatasan data proyek hijau, rendahnya literasi keuangan berkelanjutan, serta risiko teknis dan pasar masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan sistem klasifikasi atau taksonomi hijau nasional yang dapat menjadi acuan dalam menentukan proyek-proyek mana yang layak didanai dengan skema hijau, sebagaimana telah dikembangkan di Uni Eropa dan negara-negara ASEAN lainnya (ADB, 2022).

Dengan penguatan kerangka regulasi, dukungan fiskal, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan investasi hijau sebagai

motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tahun 2025 dan seterusnya. Pendekatan ini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap krisis iklim di masa depan.

Pengembangan Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya dapat diukur dari keberhasilan menjaga lingkungan atau meningkatkan angka PDB, tetapi juga harus mencerminkan distribusi hasil pembangunan yang adil dan merata. Dalam hal ini, inklusivitas sosial menjadi dimensi penting dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Ekonomi inklusif mengacu pada sistem yang memungkinkan partisipasi seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya terpinggirkan, dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi (Ranieri & Ramos, 2013).

Di Indonesia, ketimpangan pendapatan dan kesenjangan wilayah masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, strategi pengembangan ekonomi inklusif difokuskan pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan kelompok rentan, seperti pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembangunan desa berkelanjutan, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Program Dana Desa, misalnya, telah menunjukkan potensi dalam mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi lokal yang lebih inklusif (Bappenas, 2022).

Pemberdayaan UMKM menjadi elemen penting karena sektor ini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan digitalisasi UMKM, dan penguatan rantai pasok berbasis lokal. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dukungan terhadap UMKM juga diarahkan agar mampu mengadopsi praktik ramah lingkungan dan bersertifikasi hijau (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Pembangunan desa berkelanjutan juga menjadi strategi krusial dalam memperkuat ekonomi inklusif. Melalui pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal, desa didorong untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian organik, ekowisata, energi terbarukan, dan produk kreatif. Program Desa Mandiri Energi dan Desa Cerdas merupakan contoh inisiatif yang mengintegrasikan teknologi, pemberdayaan sosial, dan perlindungan lingkungan dalam satu paket pembangunan (Kemendesa, 2023).

Di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan akses di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) menjadi fokus kebijakan. Pemerintah mendorong distribusi guru dan tenaga kesehatan yang lebih merata, pembangunan infrastruktur sekolah dan puskesmas, serta penyediaan beasiswa dan jaminan sosial. Tujuannya adalah menciptakan sumber daya manusia yang sehat, terampil, dan mampu bersaing di era ekonomi hijau dan digital (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Digitalisasi ekonomi juga berperan besar dalam mendorong inklusi keuangan. Teknologi keuangan (fintech), perbankan digital, dan platform pembayaran elektronik telah membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan formal. Menurut Bank Indonesia (2023), pertumbuhan pengguna layanan keuangan digital di daerah pedesaan meningkat signifikan, yang secara langsung berdampak pada peningkatan konsumsi, tabungan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Dengan demikian, pengembangan ekonomi inklusif merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tanpa memperhatikan aspek pemerataan, pembangunan akan menciptakan kesenjangan yang berpotensi menghambat pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan tahun 2025 harus mengintegrasikan prinsip inklusivitas dalam setiap sektor, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional.

Inovasi Teknologi Dan Digitalisasi

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Digitalisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mengurangi konsumsi sumber daya, serta memperluas akses terhadap layanan publik dan finansial. Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, penerapan

teknologi digital memungkinkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya secara real-time, sekaligus menciptakan model bisnis baru yang ramah lingkungan (UNESCAP, 2021).

Sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang mengalami transformasi signifikan melalui pemanfaatan teknologi cerdas. Penggunaan smart farming berbasis Internet of Things (IoT), drone untuk pemetaan lahan, serta aplikasi pertanian digital telah meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan penggunaan pupuk kimia dan air secara berlebihan. Inovasi ini turut mendukung pencapaian ketahanan pangan yang lebih ramah lingkungan dan efisien (FAO, 2022). Pada sektor energi, digitalisasi diterapkan melalui sistem manajemen energi cerdas, pemantauan konsumsi energi, dan integrasi jaringan listrik dengan energi terbarukan berbasis teknologi digital. Smart grid dan metering systems memungkinkan efisiensi distribusi energi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan energi secara lebih bijak. Penggunaan blockchain dalam perdagangan karbon juga mulai dikembangkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan lingkungan (IEA, 2023).

Sektor transportasi juga mengalami disrupti positif melalui pengembangan sistem transportasi rendah emisi berbasis digital. Kendaraan listrik, sistem navigasi cerdas, dan integrasi aplikasi mobilitas publik (seperti aplikasi multimoda) mengurangi emisi karbon sekaligus memperbaiki efisiensi mobilitas masyarakat. Pemerintah Indonesia, melalui program Smart City, telah mendorong kota-kota besar untuk mengadopsi teknologi transportasi berkelanjutan yang terkoneksi dengan sistem informasi lalu lintas dan kualitas udara (Kominfo, 2023).

Dalam mendukung pengembangan teknologi hijau, riset dan inovasi menjadi fondasi penting. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk menghasilkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mendorong pendanaan riset di bidang energi terbarukan, rekayasa lingkungan, dan teknologi material daur ulang. Hasil riset ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai ekologis jangka panjang (BRIN, 2023).

Namun demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya tergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan kapasitas digital menjadi keharusan, khususnya di sektor-sektor hijau. Program literasi digital, pelatihan teknologi hijau, dan insentif untuk inovator lokal perlu diperluas. Dalam hal ini, kesenjangan digital antarwilayah harus diatasi agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (World Bank, 2023).

Dengan demikian, inovasi teknologi dan digitalisasi merupakan elemen strategis dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Teknologi menjadi jembatan antara efisiensi ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Untuk itu, peran negara dalam memfasilitasi riset, memperkuat regulasi teknologi hijau, serta menjamin keterjangkauan akses digital harus menjadi prioritas kebijakan pembangunan nasional tahun 2025.

Evaluasi Dan Tantangan Implementasi

Walaupun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan berkelanjutan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Tantangan tersebut mencakup lemahnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, rendahnya integrasi perencanaan pusat dan daerah, serta minimnya mekanisme pelaporan dan evaluasi kebijakan yang konsisten. Ketidaksinkronan ini seringkali menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan dan kurangnya efektivitas dalam pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan (Bappenas, 2022).

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan pembiayaan untuk proyek-proyek hijau dan berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah mulai menerbitkan green sukuk dan mengembangkan kerangka anggaran hijau (green budgeting), kebutuhan pendanaan pembangunan berkelanjutan jauh lebih besar daripada yang tersedia. Banyak daerah masih bergantung pada dana transfer pusat yang belum sepenuhnya berbasis kinerja keberlanjutan. Ketimpangan akses ke sumber pembiayaan antara daerah maju dan tertinggal juga memperlebar kesenjangan pembangunan (Kementerian Keuangan, 2023). Resistensi dari sektor industri tradisional juga menjadi tantangan signifikan. Banyak pelaku usaha masih

mengandalkan praktik produksi lama yang intensif energi dan berdampak besar terhadap lingkungan. Kurangnya insentif ekonomi, keterbatasan teknologi, serta kekhawatiran terhadap biaya transisi membuat adopsi inovasi hijau berjalan lambat. Padahal, transisi menuju ekonomi rendah karbon sangat bergantung pada peran aktif sektor swasta dalam mendukung inovasi dan investasi berkelanjutan (OECD, 2023).

Monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap implementasi strategi pembangunan berkelanjutan masih belum optimal. Banyak indikator kinerja belum dikembangkan secara holistik untuk mencerminkan keberhasilan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penguatan sistem Monev berbasis data yang transparan, inklusif, dan terintegrasi antar lembaga sangat diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan benar-benar membawa dampak positif di lapangan (UNDP, 2022).

Reformasi birokrasi juga menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas implementasi kebijakan. Masih banyak praktik administratif yang tidak efisien dan belum responsif terhadap isu-isu keberlanjutan. Untuk itu, digitalisasi tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas SDM aparatur, serta sistem insentif berbasis kinerja keberlanjutan perlu dikembangkan secara menyeluruh agar birokrasi mampu menjadi motor utama perubahan (LAN RI, 2023). Di sisi lain, kesadaran dan partisipasi publik terhadap isu pembangunan berkelanjutan masih relatif rendah, khususnya di daerah pedesaan dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pendidikan publik, kampanye kesadaran lingkungan, serta pelibatan masyarakat sipil dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan perlu diperluas. Tanpa dukungan dari akar rumput, strategi pembangunan berkelanjutan hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata (World Bank, 2023).

Dengan demikian, keberhasilan strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik kebijakan dirancang, tetapi juga oleh seberapa kuat institusi melaksanakannya dan sejauh mana publik berpartisipasi. Perbaikan tata kelola, reformasi birokrasi, serta investasi pada pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan syarat mutlak agar arah pembangunan tahun 2025 benar-benar dapat menjawab tantangan jangka panjang Indonesia.

KESIMPULAN

Strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan pada tahun 2025 harus mengedepankan pendekatan terintegrasi antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Penguatan kebijakan, peningkatan investasi hijau, pengembangan ekonomi inklusif, serta pemanfaatan inovasi teknologi merupakan kunci utama. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar transformasi menuju ekonomi berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26-43.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729-738.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Asian Development Bank (ADB). (2022). *Developing a Green Taxonomy in ASEAN*. Manila: Asian Development Bank.
- Asnuryati, A. (2023). Strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan di desa: mendorong pemberdayaan komunitas dan kemandirian ekonomi lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2175-2183.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2023). *Peta Riset dan Inovasi Teknologi Hijau Nasional*. Jakarta: BRIN.

- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perkembangan Inklusi Keuangan Digital di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bappenas. (2022). *Peta Jalan Ekonomi Hijau Indonesia 2022-2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Barbier, E. B. (2010). *A Global Green New Deal: Rethinking the Economic Recovery*. Cambridge University Press.
- BKPM. (2024). *Laporan Investasi Triwulan IV Tahun 2024*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga.
- FAO. (2022). *Digital Agriculture: The Future of Farming in Asia and the Pacific*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Hutajulu, H., Runtunuwu, P. C. H., Judijanto, L., Ilma, A. F. N., Ermanda, A. P., Fitriyana, F., ... & Wardhana, D. H. A. (2024). *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- International Energy Agency (IEA). (2023). *Southeast Asia Energy Outlook 2023*. Paris: IEA.
- Iswanaji, C., Nafi'Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analitycal Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195-208.
- Jhingan, M. L. (2003). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Laporan Green Sukuk Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Teori Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics (8th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Meilina, R. Y., & Oktavian, R. (2022). Strategi Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan melalui Agenda Tahun Ekonomi Kreatif Internasional. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(2), 63-74.
- Murni, Asfia. (2006). *Ekonomika Makro*. Bandung: PTRefika Aditama.
- Mutmainah, I., & Cahyono, H. (2021). Strategi Pengembangan Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(1), 186-204.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurif, M. (2010). Pembangunan ekonomi berbasis agribisnis sebagai wujud dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. *Jurnal Sosial Humaniora (Jsh)*, 3(2), 124-138.
- OECD. (2023). *Greening the Indonesian Economy: Opportunities and Challenges*. Paris: OECD Publishing.
- Pahrijal, R., Ardhiyansyah, A., Budiman, D., Rahmawati, Y. D., Hermawan, I., Juniarso, A., & Gumelar, T. M. (2024). Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Komunitas di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(04), 350-360.
- Prajanti, S. D. W., Margunani, M., Rahma, Y. A., Kristanti, N. R., & Adzim, F. (2021). Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 15(2), 86-101.
- Putong, Iskandar. (2013). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56)*.
- Ramadani, S., Ramadhani, D. A., Ikrom, M., & Harahap, L. M. (2025). Peran strategis UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 158-166.
- Ranieri, R., & Ramos, R. A. (2013). *Inclusive Growth: Building Up a Concept*. Working Paper 104, International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG), UNDP.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Samuelson & Nordhaus. (2005). *Economics 8th Edition*. New York: Mc Graw Hill-Irwin.

-
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12-23.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Cetakan ke-23. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susilo, J. H., & Afrizal, M. F. A. (2024). *MENJEMBATANI KESEJAHTERAAN: PANDUAN PRAKTIS PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL BERKELANJUTAN: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Sebagai Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Lokal*. Insight Mediatama.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Harlow: Pearson Education.
- UNDP. (2022). *Indonesia's Progress on Sustainable Development Goals*. United Nations Development Programme Indonesia.
- Wardhono, A., Indrawati, Y., & Qori'ah, C. G. (2018). *Inklusi keuangan dalam persimpangan kohesi sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan*. Pustaka Abadi.
- World Bank. (2023). *Digital Indonesia: Unlocking the Potential of the Digital Economy for All*. Washington, DC: The World Bank.
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170-186.
- Yulia, S., & Supriatna, E. (2024). Kontribusi Masyarakat Dalam Menentukan Arah Pembangunan Ekonomi Global Yang Berkelanjutan Di Indonesia. *Educatus*, 2(2), 1-8.